

PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA

Rohani Inta Dewi¹, Hamdi², M. Adib Zata Ilmam³, Lalu Moh Nazar Fajri⁴

^{1,2,3,4}Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

rohanidewi09@gmail.com , hamdikhaldun@gmail.com , zatailmam@gmail.com,
nazarfajri8@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengembangan BUMDES diberbagai tempat, yang nantinya bisa dikembangkan di desa lain. Metode yang digunakan yaitu menggunakan *Systematic Literature Review* dengan mengumpulkan beberapa jurnal ilmiah diambil dengan cara acak, adapun temuan dalam penelitian ini adalah BUMDES bisa menjadi kekuatan baru dalam menunjang pembangunan, karena bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, dan menekan angka urbanisasi masyarakat desa ke kota, kalau tidak desa akan kehilangan populasi penduduk.

Kata Kunci: Kebijakan, Badan Usaha Milik Desa, Pendapatan Asli Desa.

PENDAHULUAN

Dunia usaha adalah tempat yang menantang di mana berbagai risiko dan peluang ditemui setiap hari. Menurut definisi, tujuan akhir dari sebuah perusahaan adalah mengejar produktivitas ekonomi dan memaksimalkan laba. Produktivitas dan laba bukan saja di monopoli oleh organisasi private sector, namun public sector juga dapat berkontribusi aktif dalam pengembangan ekonomi berbasis masyarakat terutama masyarakat pedesaan.

Pengembangan ekonomi desa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional dianggap sebagai suatu isu penting yang harus mendapat perhatian khusus dari semua pihak.

Upaya pengembangan ekonomi desa saat ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga implementasinya dilapangan dapat berjalan dengan terintegrasi.

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi desa adalah dengan Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) melalui organisasi bisnis yang dapat mempercepat pertumbuhan dengan cara Inkubator bisnis, dan menghubungkan pengusaha dengan pemodal ventura (Hutabarat & Pandin, 2014), dan kekuatan inovatif perusahaan sosial pedesaan berasal dari kemampuan mereka untuk secara strategis menghubungkan Masyarakat pedesaan dengan jaringan supra-regional (Richter, 2019). Keberadaan UMKM sangat penting, namun kelemahannya pada pembinaan kepada masyarakat masih kurang.

Padahal Negara Indonesia pernah mengalami krisis pada tahun 1998 dan 2008, namun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki ketahanan nasional yang mampu memberikan kontribusi positif dan mandiri sehingga sektor tersebut patut dikembangkan (Ashton et al., 2018). Bisa kita melihat dari hasil penelitian di amerika latin karibia menunjukkan UMKM sangat penting di daerah berkembang karena mereka adalah mesin pertumbuhan ekonomi. Mereka merupakan 90% dari perusahaan di *Location Area Code (LAC)*, menyumbang 25% dari PDB daerah dan mewakili 50% dari pekerjaan.

Temuan di atas memberikan suatu gambaran yang menarik tentang keberadaan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di negara berkembang. Selain itu upaya untuk pengembangan UMKM telah dilakukan di Indonesia, namun upaya tersebut menemui hambatan di beberapa bidang, terutama Masyarakat kekurangan modal dalam mengembangkan usaha (Moyes et al., 2014), sehingga rumah tangga bergantung pada jaringan Rentenir, disamping itu 'gaya hidup' di kawasan menghambat pertumbuhan Usaha (Moyes et al., 2014).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dalam mengembangkan Usaha Kecil Menengah Masyarakat kekurangan modal, sehingga menurut (Vage Mariet, 2016) mengungkapkan bahwa penggunaan kredit pedesaan sebagai input produksi menambah pendapatan bagi UMKM (Mariet Ocasio, 2016). Namun menjadi masalah disisi lain Kesadaran Masyarakat dalam mengembalikan uang pinjaman dari BUMDES masih kurang, oleh sebab itu membuat BUMDES gagal. Sementara permintaan kredit di pedesaan Cina sangat besar, dan pinjaman informal telah menjadi sumber utama kredit bagi orang miskin (Xiang et al., 2014). Belum lagi perasingan asing masuk menghambat keberhasilan usaha (Liang, 2006).

Oleh karena itu pengembangan lebih lanjut dari perusahaan pedesaan harus fokus pada sejumlah isu kebijakan, termasuk mempromosikan perusahaan Usaha Kecil Menengah, meningkatkan struktur industri, mengembangkan industri pengolahan agribisnis, meningkatkan kualitas dan branding, dan mendorong kolaborasi ekonomi dan teknis regional. Sesuai dengan potensi masing-masing desa.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, Keberadaan UMKM sangat penting untuk menghidupkan roda perekonomian nasional. Sehingga kedepan pemerintah perlu membuat Badan Usaha Miliki Desa (BUMDES), sesuai dengan amanat Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014, dimana semangatnya untuk mewujudkan Masyarakat Mandiri dan Sejahtera. dalam proses mengembangkan BUMDES tentu ada tantangan dan peluang dihadapi, oleh sebab itu perlu kehadiran pemerintah dalam membuat regulasi yang berpihak, dan memberikan modal usaha Bagi para pelaku Usaha sesuai dengan mekanisme yang dirancang.

METODE

Metode penelitian *Systematic Literature Review (SLR)* adalah suatu pendekatan ilmiah yang sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan informasi yang relevan dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam suatu bidang pengetahuan tertentu. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang perkembangan ilmiah terbaru, mengidentifikasi area-area penelitian yang belum tercakup dengan baik, dan menyusun temuan-temuan menjadi satu kesatuan yang kohesif.

Proses SLR dimulai dengan penentuan pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik. Pertanyaan ini akan menjadi panduan untuk mencari dan mengevaluasi literatur yang relevan. Kemudian, pencarian literatur dilakukan menggunakan berbagai sumber seperti basis data akademik, perpustakaan digital, dan jurnal-jurnal ilmiah. Pencarian ini dilakukan dengan menggunakan istilah-istilah kunci yang terkait dengan topik penelitian.

Setelah literatur-literatur terkait ditemukan, langkah selanjutnya adalah seleksi studi. Kriteria inklusi dan eksklusi telah ditetapkan sebelumnya untuk membantu memilih studi yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Pada tahap ini, studi-studi dievaluasi berdasarkan judul, abstrak, dan isi penuhnya. Setelah studi-studi yang relevan

dipilih, data yang relevan diekstrak. Ini bisa meliputi informasi tentang metode penelitian yang digunakan, sampel yang diambil, alat-alat yang digunakan, temuan utama, dan lainnya. Data ini kemudian dievaluasi untuk mengukur kualitas dan validitas studi-studi tersebut. Tahap analisis dan sintesis dilakukan untuk menggabungkan temuan-temuan dari berbagai studi. Informasi ini dianalisis, dibandingkan, dan dikaitkan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kontradiksi dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menyusun temuan-temuan menjadi suatu kerangka pemahaman yang lebih luas.

Hasil dari analisis ini disajikan dalam bentuk laporan yang struktural dan sistematis. Laporan ini mencakup ringkasan temuan, analisis mendalam, interpretasi, dan kesimpulan yang diambil dari literatur yang ditinjau. Proses SLR ini biasanya melibatkan validasi oleh rekan sejawat untuk memastikan kualitas dan keakuratan metodologi serta temuan yang dihasilkan. Secara keseluruhan, metode *Systematic Literature Review* adalah suatu cara yang efektif untuk mengumpulkan, menyaring, dan menganalisis penelitian yang ada dalam suatu bidang pengetahuan. Dengan pendekatan yang terstruktur dan obyektif, SLR memberikan landasan yang kuat untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan pengembangan penelitian selanjutnya.

Menganalisis Keberhasilan dan Kegagalan Kebijakan Badan Usaha Milik Desa

Kebijakan umumnya dipakai untuk menunjukkan pilihan terpenting yang diambil baik dalam kehidupan organisasi atau privat (Mariet Ocasio, 2016), dan menurut Thomas R Dye, Kebijakan adalah kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Melihat dari dua definisi ini Ruang lingkup kebijakan tidak hanya untuk sektor publik saja, namun didalamnya ada privat, dan dalam pengelolaan BUMDES kita akan melihat dua sektor itu saling mempengaruhi, karena BUMDES milik publik namun dikelola dengan cara privat. Bisa kita lihat dari definisi dibawah ini.

Dimana BUMDES adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan Masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan desa dalam mengembangkan BUMDES tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat dengan cara mengembangkan aset tenaga kerja rumah tangga yang memiliki dampak positif pada pengembangan usaha (Mariet Ocasio, 2016), oleh sebab itu *Home Based Business* (HBB) adalah sebagai kendaraan potensial untuk pembangunan sosial dan ekonomi, karena Bagi beberapa orang rumah adalah tempat bisnis untuk mendatangkan Pendapatan (Newbery & Bosworth, 2010). Selama ini kita melihat industry rumahan tidak terlalu diperhatikan, padahal memiliki dampak yang sangat besar baik secara ekonomi maupun sosial. Sehingga kalau itu bisa jalan, BUMDES kedepan bisa menjadi kekuatan baru dalam menumbuhkan kembangkan perekonomian masyarakat, karena akan begitu banyak lapangan kerja akan tercipta, dan angka pengangguran akan berkurang, karena home industri dikembangkan. Para ibu-ibu bisa bekerja dirumah sambil menjaga anak-anaknya.

Pemerintah menyediakan pasar hasil produksi dari Home Industri dengan mengembangkan BUMDES sebagai tempat menampung yang nantinya BUMDES menjual ke Konsumen. Bisa kita lihat keberhasilan usaha itu pada sector Non Pertanian pedesaan didesa Lesotho yang digerakkan secara bersama-sama oleh masyarakat dengan cara membangun jejaring sosial yang lebih luas, penyediaan pasar, ketersediaan jaringan komunikasi dan infrastruktur (Rantšo, 2016). Adapun yang dikembangkan

disekotlandia misalnya hanya makanan dan pariwisata, namun mampu meningkatkan nilai tambah (Burnett & Danson, 2004).

Semangat yang perlu dibangun dalam mengembangkan usaha desa adalah kebersamaan, dimana semua orang terlibat, dan posisi pemerintah membangun infrastruktur dengan tujuan mempermudah dan mengurangi biaya produksi. Karena selama ini yang terjadi biaya produksi tidak sebanding dengan hasil penjualan, walaupun mendapatkan keuntungan tidak terlalu besar. Sehingga masyarakat mengalami kerugian. Disamping yang dibutuhkan selain kerjasama yaitu inovasi dan kreatifitas. Bisa kita lihat di beberapa desa yang telah berhasil dalam mengembangkan BUMDES yaitu; Tirta Mandiri Kelaten Jawa Tengah mengembangkan destinasi wisata kolam pemandian dengan omset 6,5 miliar pertahun. Begitupun apa yang dilakukan di Karang Kendari Cilacap Jawa Tengah sebagai suplayer PLTU, dan di Srisadani Bojo Ngoro Jatim bergerak dipompanisasi, dan terop. Rata-rata mereka mampu meningkatkan pendapatan Masyarakat (Moore & Jie Wen, 2006).

Melihat temuan diatas menunjukkan bahwa ada beberapa kunci keberhasilan BUMDES yaitu; inovasi, kreatifitas, networking, dan memberikan kepercayaan manajerial pada karyawan. Dari sekian nilai inilah yang menjadikan BUMDES berhasil, karena didalamnya dibutuhkan orang-orang yang visioner dan mempunyai ketertarikan di dunia usaha. Disamping itu desa memberikan keleluasaan kepada pengelola dalam mengembangkan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama, dan tidak terlalu jauh diinterpendensi, namun yang perlu dilakukan adalah pengawasan oleh semua pihak terutama masyarakat supaya tidak terjadi penyelewengan. Sehingga kedepan dibutuhkan tata kelola yang baik untuk mengembangkan potensi, Bisa kita lihat dari Hasil temuan di Sulawesi yang hanya mengembangkan budidaya rumput laut namun mendatangkan keuntungan besar.

Adapun yang menyebabkan kegagalan BUMDES ketika dikelola hanya oleh pemerintah desa saja, karena tidak dengan cara profesional yang sering sekali ditunjuk hanya orang-orang dekat atau keluarganya, walaupun kadang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola. Oleh sebab itu perlu dilakukan kerjasama dengan pihak privat, desa sebagai pemilik saham terbesar. Kalau tidak dikelola dengan cara privat sector, maka akan banyak menuai kegagalan (Moore & Jie Wen, 2006). Bisa kita melihat di beberapa desa

Disamping itu menjadi masalah masyarakat pedesaan seperti Lemahnya Sumber daya manusia, mengingat tingkat pendidikannya masih rendah. Sehingga kedepan perlu dipersiapkan melalui pelatihan-pelatihan. Disamping itu Masalah yang dihadapi Masyarakat dalam menjalankan usahanya adalah kekurangan modal, karena susah mendapatkan akses atau tempat meminjam, karena tidak ada jaminan yang dimiliki, apalagi di tempat-tempat formal seperti di Bank. Begitupun hal yang sama terjadi di india dimana para pelaku usaha kecil dan menengah kesulitan dalam mengakses modal terutama dilembaga-lembaga swasta seperti Bank. Oleh karena itu Kedepan pemerintah perlu menganggarkan untuk menghidupkan Usaha Masyarakat desa dengan cara memberikan bantuan modal.

Disamping itu menjadi tantangan masyarakat desa adalah masih buruknya infrastruktur jaringan telekomunikasi yang itu menghambat pembangunan pedesaan (Salemink et al., 2017), karena saat ini masih berpusat lebih banyak di kota belum merata sampai ke desa. Mengingat kedepan masyarakat secara keseluruhan bergerak menuju masyarakat digital, di mana akses dan penggunaan infrastruktur data sangat penting. pemanfaatan jaringan telekomunikasi dalam rangka mempercepat

pembangunan desa. dimana banyak transaksi-transaksi usaha melalui online terjadi, dan itu memberikan kemudahan dan mendatangkan nilai tambah.

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa

Mengembangkan usaha di setiap desa menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk mendukung percepatan pembangunan, mengingat angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2015 sekitar 10, 25 %. Padahal kita memiliki potensi di sektor pertanian, perikanan dan pariwisata. Kalau tiga potensi ini bisa dikelola dengan baik, maka tidak ada alasan Masyarakat hidup dibawah garis kemiskinan. Namun menjadi problem semua itu belum terkelola dengan maksimal baik oleh Pemerintah sebagai pemangku kebijakan maupun oleh Masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, Pemerintah perlu mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang fungsinya sebagai tempat mengelola potensi desa.

Sesuai dengan amanat Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana kepala desa bisa mengelola atau mengembangkan desanya sesuai dengan potensi masing-masing untuk kesejahteraan Masyarakat. Apalagi didukung oleh anggaran desa yang terus bertambah, seperti tahun 2017 rata-rata 1,5 Miliar dimasing-masing desa, dan ini kadang membuat kepala desa merasa kebingungan atau gagap mengelola uang yang sebegitu besar untuk pembangunan, karena sebelumnya tidak dipersiapkan terlebih dahulu Sumber dayanya, sehingga penggunaan anggaran itu tidak tepat sasaran, maka pembangunan fisik maupun sumber daya manusia tidak terlihat hasilnya, karena belum ada perencanaan yang baik. Oleh sebab itu perlu ada BIMTEK untuk kepala desa dan pengurus Bumdes yang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas building, mengingat anggaran yang dikelola sangat besar.

Dengan anggaran yang sekian besar ini seharusnya bisa memberikan dampak untuk kesejahteraan Masyarakat. Padahal Desa mempunyai keleluasaan mengembangkan desa masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki, dan Setiap Pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan Masyarakatnya, karena sudah jelas tujuan bernegara adalah memberikan kesejahteraan. Bahkan dalam Undang-undang desa dijelaskan bahwa kepala desa mempunyai kewajiban untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai tempat menampung hasil bumi dan barang jasa yang diproduksi oleh Masyarakat.

Namun masalahnya masih kurangnya inovasi dan kreatifitas pengurus BUMDES dalam membuat Usaha, sehingga BUMDES perlu melakukan inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan usaha, dengan cara memanfaatkan teknologi untuk sosialisasi, dan pemasaran. supaya dapat dilaksanakan dimana saja tidak mengenal waktu dan tempat, karena Melalui teknologi kita bisa membangun relasi dengan berbagai macam kalangan.

Dizaman yang serba canggih ini BUMDES bisa memanfaatkan teknologi seperti privat sector, misalnya Bukalapak, dan Traveloka, dimana Proses pemasaran dan transaksinya melalui IT. Oleh sebab itu, kedepan perlu pengadaan jaringan komunikasi dan informatika oleh pemerintah kabupaten atau provinsi sebagai factor penunjang, dan di setiap desa terkoneksi jaringan internet. Melalui internet desa itulah nantinya para pengelola bisa membangun koneksi dengan pihak lain, karena desa harus siap mengikuti perkembangan zaman, supaya Pendapatan Asli desa semakin Bertambah.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada dasarnya merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDES sebagai lembaga sosial harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan

sosial. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian sebuah Bumdes pada umumnya, yaitu: (1) Meningkatkan Perekonomian Desa, (2) Meningkatkan Pendapatan asli Desa, (3) Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan (4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Tujuan-tujuan ini akan tercapai manakala ada kesadaran bersama dari masyarakat untuk membeli produk yang dihasilkan oleh masyarakat BUMDES, dan itu bisa kita melihat di Yuanji, dimana masyarakat menggunakan produk lokal, seperti tepung, tahu dan cabai di hotel. Kepala desa Yuanjia mengorganisir pabrik-pabrik produksi makanan ringan, tahu, cabai dan bahan pangan lainnya di desa untuk meningkatkan ketahanan pangan (Gao & Wu, 2017). Badan Usaha Milik Desa juga harus mulai berpikir kearah sana untuk membeli produk Home Industri.

Hasil produksi itu juga bisa display ke tempat-tempat pariwisata, sehingga Kedepan pemerintah perlu mengembangkan dunia pariwisata pedesaan yang mendukung kebijakan industri jasa terutama pariwisata (Gao & Wu, 2017). Dengan begitu banyak serapan tenaga kerja yang bisa ditampung terutama anak-anak muda, dan ibu-ibu. Biar mereka tidak pergi bermigrasi ke kota. Dengan berkembangnya pariwisata desa. setiap restoran diwajibkan untuk membeli bahan dari BUMDES, dimana masyarakat menjadi penyedia bahan pokok bagi para wisatawan dari hasil bumi. Supaya masyarakat tidak hanya menjual barang mentah saja yang harganya murah, dengan begitu masyarakat mendapatkan nilai tambah untuk kesejahteraannya.

Sesuai dengan konsep pembangunan saat ini adalah membangun dari desa, atau membangun dari kecil ke besar, bukan sebaliknya. mengingat maju tidaknya negara sangat tergantung pada kemajuan desa. Negara terbentuk dari kumpulan-kumpulan Masyarakat dari berbagai macam pelosok. Desa harus mulai berbenah dan berfikir bagaimana menjadikan desanya menjadi mandiri dan sejahtera. Dengan mengembangkan BUMDES, karena sangat disayangkan kalau Uang negara yang berapa miliar rupiah tidak dimanfaatkan dan hilang begitu saja karena menejemen yang masih kurang baik. Karena tidak ada komitmen dan kesadaran bersama untuk membangun ekonomi. Kalau semua itu sudah maju yang mendapatkan untungnya adalah Masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu BUMDES harus dikelola dengan benar, bila perlu pengurusnya difasilitasi melakukan study banding ke desa yang sudah maju BUMDESnya, supaya memiliki gambaran apa yang akan dikembangkan sesuai dengan potensinya.

Bila perlu Pemerintah untuk menghidupkan BUMDES dengan mengadakan event atau Kompetisi untuk membangkitkan semangat kepada para pengurus supaya terus melakukan inovasi, dan memberikan reward kepada pemenang kompetisi. Dengan menambah anggarannya menjadi lebih besar, sehingga nantinya akan melahirkan etos kerja bagus. Karena Kedepan BUMDES harus menjadi ujung tombak dalam pembangunan Indonesia, Karen desa itu langsung bersentuhan dengan Masyarakat, mulai dari pengurusan administrasi sampai urusan ekonomi. BUMDES paling tidak menjadi jawaban untuk mengurangi angka kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja. Kalau itu bisa berjalan akan banyak Masyarakat bisa mendapatkan lapangan kerja.

Hadirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di masing-masing desa ini membawa angin segar untuk menghidupkan perekonomian Masyarakat. BUMDES harus terus menerus melakukan kerja keras, mengingat Jumlah desa di Indonesia 72.000 dari sabang sampai maroke, dan kalau semua desa memiliki BUMDES, maka sekian

ribu lapangan kerja akan tercipta. Adapun yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah menyediakan pasar, memberikan modal usaha untuk para petani dan pengrajin.

KESIMPULAN DAN DISKUSI

Badan Usaha Milik Desa bisa menjadi kekuatan baru dalam mengembangkan dan menciptakan nilai tambah dengan menggunakan berbagai bentuk modal pedesaan, karena BUMDES bisa memberikan kontribusi penting untuk pembangunan. bisa kita melihat dari konsep pembangunan yang berkembang saat ini, dimana pembangunan dimulai dari kecil ke besar atau dari desa ke kabupaten Sesuai dengan konsep SDGs.

Sehingga pengembangan Desa harus menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun agenda kebijakan, karena desalah yang memiliki kekayaan alam baik dalam bidang pertanian dan pariwisata. dimana sebagian besar masyarakatnya menjadi petani, dan 35% penyumbang kemiskinan adalah masyarakat petani, karena yang menjadi masalah ketika mereka panen dibeli dengan harga murah tidak seimbang antara pengeluaran dengan pendapatan, secara otomatis petani dirugikan. Oleh sebab itu kedepan perlu diadakan kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas terutama bagaimana cara mengolah bahan mentah menjadi barang jadi supaya mendapatkan nilai tambah.

Disamping itu potensi lain yang bisa dikembangkan adalah pariwisata pedesaan, dimana yang menjadi pengelola dan penyedia barang dan jasanya adalah masyarakat itu sendiri, karena saat ini menjadi salah satu sumber pendapatan negara melalui pariwisata, semakin banyak wisatawan datang, maka pendapatan semakin banyak. Baik yang didapatkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Karena pariwisata pedesaan bisa menjadi salah Kekuatan, karena masyarakat desa terkenal dengan keramahan masyarakatnya, atraksi alam dan budaya serta keamanan dan keselamatan. namun menjadi Kelemahan utama adalah manajemen yang buruk. Sehingga kedepan kalau desa mau maju maka sumber daya manusia harus dipersiapkan supaya mampu memetakan potensi desa masing-masing supaya tepat sasaran, karena selama ini banyak sekali BUMDES yang gagal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashton, W. S., Panero, M. A., Izquierdo Cruz, C., & Hurtado Martin, M. (2018). Financing resource efficiency and cleaner production in Central America. *Clean Technologies and Environmental Policy*, 20(1), 53–63. <https://doi.org/10.1007/s10098-017-1452-8>
- Burnett, K. A., & Danson, M. (2004). Adding or subtracting value?: Constructions of rurality and Scottish quality food promotion. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 10(6), 384–403. <https://doi.org/10.1108/13552550410564716>
- Gao, J., & Wu, B. (2017). Revitalizing traditional villages through rural tourism: A case study of Yuanjia Village, Shaanxi Province, China. *Tourism Management*, 63, 223–233. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.04.003>
- Hutabarat, Z., & Pandin, M. (2014). Absorptive Capacity of Business Incubator for SME's Rural Community Located in Indonesia's Village. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 115, 373–377. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.443>

- Liang, X. (2006). The evolution of township and village enterprises (TVEs) in China. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 13(2), 235–241. <https://doi.org/10.1108/14626000610665935>
- Mariet Ocasio, V. (2016). Financing village enterprises in rural Bangladesh: What determines non-farm revenue growth? *International Journal of Development Issues*, 15(1), 76–94. <https://doi.org/10.1108/IJDI-09-2015-0057>
- Moore, S., & Jie Wen, J. (2006). Reform of state owned enterprises and challenges in China. *Journal of Technology Management in China*, 1(3), 279–291. <https://doi.org/10.1108/17468770610704958>
- Moyes, D., Danson, M., & Whittam, G. (2014). Contrasting Perceptions of the Challenges of Rural SMEs: Reconciling Enterprise and Agency Views. In C. Henry & G. Mcelwee (Eds.), *Contemporary Issues in Entrepreneurship Research* (Vol. 4, pp. 59–79). Emerald Group Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S2040-724620140000004003>
- Newbery, R., & Bosworth, G. (2010). Home-based business sectors in the rural economy. *Society and Business Review*, 5(2), 183–197. <https://doi.org/10.1108/17465681011055596>
- Rantšo, T. A. (2016). Factors affecting performance/success of small-scale rural non-farm enterprises in Lesotho. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 10(3), 226–248. <https://doi.org/10.1108/JEC-10-2014-0020>
- Richter, R. (2019). Rural social enterprises as embedded intermediaries: The innovative power of connecting rural communities with supra-regional networks. *Journal of Rural Studies*, 70, 179–187. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.12.005>
- Salemink, K., Strijker, D., & Bosworth, G. (2017). Rural development in the digital age: A systematic literature review on unequal ICT availability, adoption, and use in rural areas. *Journal of Rural Studies*, 54, 360–371. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.09.001>
- Xiang, C., Jia, X., & Huang, J. (2014). Microfinance through non-governmental organizations and its effects on formal and informal credit: Evidence from rural China. *China Agricultural Economic Review*, 6(2), 182–197. <https://doi.org/10.1108/CAER-04-2013-0062>